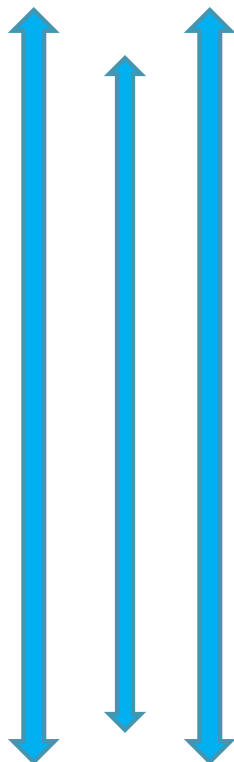




RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

**(RANHIR-RENJA)
PERUBAHAN
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH**

JALAN 17 AGUSTUS MANADO 95119

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 ini disusun berdasarkan RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. Selain itu, dengan memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan lembaga pusat, usulan program dan kegiatan juga disampaikan oleh bidang-bidang teknis dengan tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025.

Manado, 5 Agustus 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



**RAHEL R. ROTINSULU, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19760920 199511 2 001**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Triwulan II Tahun 2025 dan
Capaian Renstra PD 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 14

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 18

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD 27

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 35

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 39

BAB V PENUTUP 40

Tabel Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2025 (TC.33) 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan dokumen perencanaan tahun berjalan. Penyusunan Renja merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program dan kegiatan Rencana Strategi Perangkat Daerah 5 Tahun berdasarkan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rancangan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini, memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan Perangkat Daerah, karena Rencana Kerja ini merupakan produk perencanaan pada instansi ini. Kualitas penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini sangatlah menentukan untuk terlaksananya kualitas pelayanan publik yang baik.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini dimulai dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sesuai Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang didasarkan pada penelaahan RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam rencana kerja ini didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan

- daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;
- c. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
 - d. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana kerja ini didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
 - e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja-PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra-PD, dan RPJMD, bagi RKA-PD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Berikut ini disajikan Proses Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara :

Persiapan	Penyusunan Ranhir Renja	Forum OPD	Tahapan Penetapan Renja
Pembentukan SK	Penyusunan RENJA Disnakertrans Prov. Sulut mengacu pada Rancangan RKPD Perubahan Provinsi Sulut Tahun 2025 dan Renstra Disnakertrans Prov. Sulut 2021-2026	Penyelarasan Program/Kegiatan	Penyempurnaan Renja Verifikasi Ranhir Renja Oleh Bappeda Prov. Sulut
Orientasi mengenai Renja Disnakertrans Prov.Sulut	Evaluasi Program dan Kegiatan	Penajaman Indikator dan Target Kinerja Penyelarasan Program / Kegiatan antar PD	Pengesahan Rancangan RKPD oleh Gubernur Sulawesi Utara
Penyusunan Agenda	Identifikasi Masalah dan Pemecahan masalah		Penetapan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
Pengumpulan Data dan Informasi	Usulan Program/Kegiatan	Penyesuaian Pendanaan Program dan Kegiatan	

Tabel 1.1. Rencana Tahapan Penyusunan Renja-PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara; dan
 21. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah sebagai bahan perumusan program dan kegiatan dan/atau rencana kerja Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2025. Selanjutnya tujuan dari Rencana Kerja ini adalah sebagai bahan usulan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 yang dituangkan melalui Program dan Kegiatan dengan target yang telah ditetapkan serta untuk mendapatkan dukungan melalui APBD.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TRIWULAN II TAHUN 2025
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3.	Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
2.4.	Review terhadap Rancangan RKPD
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2025
3.3.	Program dan Kegiatan Tahun 2025
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PD

1. **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TRIWULAN II TAHUN 2025 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

Program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 terkait dengan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan terdiri dari (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, (2) Program Perencanaan Tenaga Kerja, (3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, (4) Program Penempatan Tenaga Kerja, (5) Program Hubungan Industrial, (6) Program Pengawasan Ketenagakerjaan, (7) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, (8) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan (9) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, terealisasi sebanyak 113 orang;
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, terealisasi sebanyak 50 dokumen dari target sebanyak 150 dokumen atau 33,33%;
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, terealisasi sebesar 18 Dokumen dari target sebanyak 36 dokumen atau 50%;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, terealisasi sebesar 2 Laporan dari target sebanyak 4 laporan atau 50%; dan
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, terealisasi sebesar 18 Laporan dari target sebanyak 36 laporan atau 50%.
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan :
 - a) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, terealisasi sebesar 3 Laporan dari target sebanyak 6 laporan atau 50%.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, terealisasi sebanyak 25 paket dari target renstra sebanyak 113 paket atau 22,12%; dan

- b) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, belum terealisasi dari target renstra sebanyak 113 orang.
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terealisasi sebanyak 4 paket target sebanyak 10 paket atau 40%; dan
 - b) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, terealisasi sebanyak 3 laporan dari target sebanyak 6 laporan atau 50%.
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, melalui sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, terealisasi sebesar 25 unit dari target sebanyak 50 unit.
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, melalui sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terealisasi sebanyak 18 laporan dari target sebanyak 36 laporan atau 50%; dan
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, terealisasi sebanyak 18 laporan dari target sebanyak 36 laporan atau 50%.
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, melalui sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, terealisasi sesuai target sebanyak 1 unit;
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, terealisasi sebanyak 2 unit dari target sebanyak 5 unit atau 40%;
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, terealisasi sebanyak 40 unit dari target sebanyak 60 unit atau 66,67%; dan
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, terealisasi sebanyak 2 bangunan dari target sebanyak 4 bangunan atau 50%.
- 8. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, terealisasi sebanyak 1 dokumen dari target yaitu 3 Dokumen atau 33,33%; dan
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, belum terealisasi dari target renstra yaitu 1 Dokumen.

b. Program Perencanaan Tenaga Kerja

- 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), melalui sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro, terealisasi sebanyak 2 dokumen dari target renstra yaitu 10 Dokumen

atau 20% dikarenakan beberapa Kabupaten/Kota belum menyusun Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.

c. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, melalui sub kegiatan :
 - a) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, belum terealisasi dari target renstra sebanyak 678 orang dikarenakan kegiatan belum dilaksanakan dan keterbatasan anggaran pelatihan.
2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, melalui sub kegiatan :
 - a) Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja, belum terealisasi dari target renstra sebanyak 10 LPK karena kegiatan belum dilaksanakan.

d. Program Penempatan Tenaga Kerja

1. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, melalui sub kegiatan :
 - a) Job Fair/Bursa Kerja, belum terealisasi dari target renstra yaitu 675 orang karena kegiatan belum dilaksanakan.
2. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi, melalui sub kegiatan :
 - a) Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI), belum terealisasi dari target renstra sebanyak 2500 orang karena kegiatan belum dilaksanakan.

e. Program Hubungan Industrial

1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), melalui sub kegiatan:
 - a) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), belum terealisasi dari target renstra yaitu 1 Keputusan Gubernur karena kegiatan belum dilaksanakan;
 - b) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, terealisasi sebesar 131.480 peserta pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dibanding dengan target renstra sebesar 603.534 peserta atau 21,79%.

f. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

1. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan, melalui sub kegiatan:
 - a) Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan, terealisasi sebanyak 294 Perusahaan dari target renstra sebanyak 3600 perusahaan dikarenakan kurangnya perusahaan yang mendaftar pada aplikasi Wajib Laporan

Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online serta target renstra terlalu tinggi;

- b) Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan, terealisasi sebanyak 83 perusahaan dari target dari renstra sebesar 300 perusahaan.

g. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

- 1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan, melalui sub kegiatan:
 - a) Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman, belum terealisasi dari target renstra yaitu 315 Kepala Keluarga karena kegiatan belum dilaksanakan.

h. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

- 1. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi, melalui sub kegiatan:
 - a) Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi, terealisasi sebesar 2 Dokumen dari target renstra yaitu 4 dokumen atau 50%.

i. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

- 1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, melalui sub kegiatan:
 - a) Penyuluhan Transmigrasi, belum terealisasi dari target renstra yaitu 1124 kepala keluarga.

Capaian kinerja PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENJA Tahun 2025 Triwulan II masih sangat rendah dikarenakan beberapa kegiatan teknis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih belum dilaksanakan (akan dilaksanakan di Triwulan III), dan juga terdapat belanja-belanja yang dilakukan efisiensi anggaran.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Nama PD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2025		Unit PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
	2	Urusan Wajib																
	2.07	Ketenagakerjaan																
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	% 17.575.653.408	95	% 15.136.353.744	96	% 17.050.207.028	50	% 8.081.258.441	52,08%	47,40%	145	% 23.217.612.185	145%	132%	
	2.07.01.1.02	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyerapan Anggaran Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara	100	% 16.366.610.000	95	% 13.208.737.446	96	% 14.653.654.638	50	% 7.466.016.437	52,08%	50,95%	145	% 20.674.753.883	145%	126%	
	2.07.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	113	Orang 15.911.000.000	113	Orang 12.721.739.753	113	Orang 14.200.105.130	113	Orang 7.297.715.979	100,00%	51,39%	226	Orang 20.019.455.732	200%	126%	Disnaker
	2.07.01.1.02.03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150	Dokumen 40.000.000	150	Dokumen 441.661.943	150	Dokumen 402.078.895	50	Dokumen 157.879.958	33,33%	39,27%	200	Dokumen 599.541.901	133%	1499%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.02.04	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36	Dokumen 345.000.000	36	Dokumen 18.177.950	36	Dokumen 18.756.766	18	Dokumen 1.095.000	50,00%	5,84%	54	Dokumen 19.272.950	150%	6%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.02.05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan 35.000.000	4	Laporan 7.863.900	4	Laporan 10.608.260	2	Laporan 7.080.500	50,00%	66,75%	6	Laporan 14.944.400	150%	43%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.02.07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36	Laporan 35.610.000	36	Laporan 19.293.900	36	Laporan 22.105.587	18	Laporan 2.245.000	50,00%	10,16%	54	Laporan 21.538.900	150%	60%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.03	2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah aset yang tercatat	100	% 49.653.408	100	% 10.105.900	100	% 9.405.300	50	% 730.000	50,00%	7,76%	150	% 10.835.900	150%	22%	
	2.07.01.1.03.05	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan 49.653.408	6	Laporan 10.105.900	6	Laporan 9.405.300	3	Laporan 730.000	50,00%	7,76%	9	Laporan 10.835.900	150%	22%	UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.05	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100	% 125.000.000	100	% 37.372.500	100	% 93.911.900	50	% 20.400.000	50,00%	21,72%	150	% 57.772.500	150%	46%	
	2.07.01.1.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	113	Paket 95.000.000	46	Paket 37.040.000	113	Paket 93.400.000	25	Paket 20.400.000	22,12%	21,84%	71	Paket 57.440.000	63%	60%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.05.11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	113	Orang 30.000.000	25	Orang 332.500	113	Orang 511.900	0	Orang 0	0,00%	0,00%	25	Orang 332.500	22%	1%	Disnaker
	2.07.01.1.06	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kehadiran dalam acara yang diundang	100	% 255.000.000	97	% 321.433.182	98	% 282.598.907	50	% 48.996.920	51,02%	17,34%	147	% 370.430.102	147%	145%	
	2.07.01.1.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket 120.000.000	10	Paket 88.782.200	10	Paket 93.121.507	4	Paket 11.215.200	40,00%	12,04%	14	Paket 99.997.400	140%	83%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan															

1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	
1	2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat - Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	135.000.000	6 laporan	232.650.982	6 laporan	189.477.400	3 laporan	37.781.720	50,00%	19,94%	9 laporan	270.432.702	150%	200%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK
	2.07.01.1.07	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Realisasi Pengadaan	100 %	50.000.000	100 %	96.502.999	100 %	265.749.430	50 %	10.000.000	50,00%	3,76%	150 %	106.502.999	150%	213%	
	2.07.01.1.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	50.000.000	50 unit	96.502.999	50 unit	265.749.430	15 unit	10.000.000	30,00%	3,76%	65 unit	106.502.999	130%	213%	Disnaker
	2.07.01.1.08	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata- rata Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut	99 %	256.000.000	97 %	1.117.491.486	98 %	1.381.990.350	50 %	440.270.994	51,02%	31,86%	147 %	1.557.762.480	148%	609%	
	2.07.01.1.08.02	- Penyediaan Jasa - Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	46.000.000	36 Laporan	247.929.464	36 Laporan	260.400.000	18 Laporan	67.575.504	50,00%	25,95%	54 Laporan	315.504.968	150%	686%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 Laporan	210.000.000	36 Laporan	869.562.022	36 Laporan	1.121.590.350	18 Laporan	372.695.490	50,00%	33,23%	54 Laporan	1.242.257.512	150%	592%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK,
	2.07.01.1.09	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik	100 %	418.390.000	98 %	338.887.831	99 %	348.937.603	50 %	91.694.090	50,51%	26,28%	148 %	430.581.921	148%	103%	
	2.07.01.1.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	175.000.000	1 unit	55.695.100	1 unit	68.317.780	1 unit	19.795.000	100,00%	28,97%	2 unit	75.490.100	200%	43%	Disnaker
	2.07.01.1.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	43.390.000	5 unit	189.769.431	5 unit	197.143.323	2 unit	56.083.590	40,00%	28,45%	7 unit	245.853.021	140%	567%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.09.06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	75.000.000	60 unit	29.000.000	60 unit	47.000.000	40 unit	9.356.500	66,67%	19,91%	100 unit	38.356.500	167%	51%	Disnaker, UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.01.1.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 bangunan	125.000.000	4 bangunan	64.423.300	4 bangunan	36.476.500	2 bangunan	6.459.000	50,00%	17,71%	6 bangunan	70.882.300	150%	57%	Disnaker, UPTD Balai Pelatihan TK,
	2.07.01.1.01	8 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	55.000.000	100 %	5.822.400	100 %	13.958.900	50 %	3.150.000	50,00%	22,57%	150 %	8.972.400	150%	16%	
	2.07.01.1.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	40.000.000	3 dokumen	5.303.900	3 dokumen	6.398.900	1 dokumen	3.150.000	33,33%	49,23%	4 dokumen	8.453.900	133%	21%	Disnaker
	2.07.01.1.01.04	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	518.500	1 dokumen	5.160.000	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	1 dokumen	518.500	100%	3%	Disnaker
	2.07.01.1.01.05	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	0 dokumen	0	1 dokumen	2.400.000	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0 dokumen	-	0%	#DIV/0!	Disnaker
2	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	80 %	40.943.623	20 %	82.901.920	66 %	79.971.900	9 %	18.835.600	13,64%	23,55%	29 %	101.737.520	36%	248%	
	2.07.02.1.01	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	13 Dokumen	40.943.623	9 Dokumen	82.901.920	11 Dokumen	79.971.900	0 Dokumen	18.835.600	0,00%	23,55%	9 Dokumen	101.737.520	69%	248%	
	2.07.02.1.01.01	- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	12 Dokumen	40.943.623	3 Dokumen	82.901.920	10 Dokumen	79.971.900	2 Dokumen	18.835.600	20,00%	23,55%	5 dokumen	101.737.520	42%	248%	Disnaker
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi	64 %	96.097.352	62 %	141.613.300	63 %	279.709.000	0 %	-	0,00%	0,00%	62 %	-	97%	0%	

1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3	2.07.04.1.03	1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah provinsi	1090 lowongan	96.097.352	3037 lowongan	141.613.300	1080 lowongan	244.722.000	0 lowongan	-	0,00%	0,00%	3.037 lowongan	141.613.300	279%	147%	
	2.07.04.1.03.03		- Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	700 orang	96.097.352	650 orang	141.613.300	675 orang	244.722.000	0 orang	0	0,00%	0,00%	650 orang	141.613.300	93%	147%	Disnaker
		1	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di	Jumlah CPMI/PMI yang ditempatkan	0 orang	-	0 orang	-	2500 orang	34.987.000	0 orang	-	0,00%	0,00%	0 orang	-	####	####	
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	0 orang	0	0 orang	0	2500 orang	34.987.000	0 orang	0	0,00%	0,00%	0 orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Disnaker
4	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	85 %	403.880.903	100 %	226.399.117	80 %	165.004.290	- %	-	0,00%	0,00%	100 %	226.399.117	118%	56%	
	2.07.03.1.01	1	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster	Persentase Penyerapan Lulusan	80 %	350.000.000	100 %	171.205.381	70 %	136.097.290	- %	-	0,00%	0,00%	100 %	171.205.381	125%	49%	
	2.07.03.1.01.01		- proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	700 orang	350.000.000	48 orang	171.205.381	678 orang	136.097.290	0 orang	0	0,00%	0,00%	48 orang	171.205.381	7%	49%	UPTD Balai Pelatihan TK
	2.07.03.1.02	2	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi (Program Keluruan)	60 %	53.880.903	100 %	55.193.736	50 %	28.907.000	- %	-	0,00%	0,00%	100 %	55.193.736	167%	102%	
	2.07.03.1.02.01		- Survey dan penilaian akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (Program Keluruan)	10 LPK	53.880.903	16 LPK	55.193.736	10 LPK	28.907.000	0 LPK	0	0,00%	0,00%	16 LPK	55.193.736	160%	102%	UPTD Balai Pelatihan TK
5	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	80 %	11.091.939.614	54,53 %	14.472.527.639	70 %	14.503.058.500	8,3 %	1.253.126.349	11,86%	8,64%	63 %	15.725.653.988	79%	142%	
	2.07.05.1.03	2	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum	Jumlah Kabupaten/Kota yang menetapkan UMK sesuai dengan peraturan perundangan	Kabup 1 aten/ Kota	11.000.000.000	Kabup 1 aten/ Kota	14.472.527.639	Kabup 1 aten/ Kota	14.503.058.500	Kabup 0 aten/ Kota	1.253.126.349	0,00%	8,64%	Kabup 1 aten/ Kota	15.725.653.988	100%	143%	
	2.07.05.1.03.01		- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Keputusan 1 Gubernur	500.000.000	Keputusan 1 Gubernur	102.221.000	Keputusan 1 Gubernur	103.058.500	Keputusan 0 Gubernur	0	0,00%	0,00%	Keputusan 1 Gubernur	102.221.000	100%	20%	Disnaker
	2.07.05.1.03.05		- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	605325 orang	10.500.000.000	598272 orang	14.370.306.639	603534 orang	14.400.000.000	131.480 orang	1.253.126.349	21,79%	8,70%	729.752 orang	15.623.432.988	121%	149%	Disnaker
6	2.07.06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	100 %	444.928.857	90 %	251.466.365	95 %	150.793.145	30 %	64.305.750	31,58%	42,65%	120 %	315.772.115	120%	71%	
	2.07.06.1.01	1	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	3 Kegiatan	444.928.857	3 Kegiatan	251.466.365	3 Kegiatan	150.793.145	1 Kegiatan	64.305.750	33,33%	42,65%	4 Kegiatan	315.772.115	133%	71%	
	2.07.06.1.01.01		- Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	3750 Perusahaan	204.000.000	3.316 Perusahaan	44.265.500	3600 Perusahaan	23.801.840	294 Perusahaan	9.310.000	8,17%	39,11%	3.610 Perusahaan	53.575.500	96%	26%	UPTD Balai Pengawasan TK
	2.07.06.1.01.02		- Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan			0	0			0	0	#DIV/0!		0	#DIV/0!			
	2.07.06.1.01.03		- Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan K3	350 Perusahaan	240.928.857	247 Perusahaan	207.200.865	300 Perusahaan	126.991.305	83 Perusahaan	54.995.750	27,67%	43,31%	330 Perusahaan	262.196.615	94%	109%	Disnaker, UPTD Balai Pengawasan TK
	3.32		Urusan Pemerintahan Pilihan Transmigrasi																
	3.32.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	100 %	9.192.483	0 %	-	90 %	19.909.100	30 %	-	33,33%	0,00%	30 %	-	30%	0%	

1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 =12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			
7	3.32.04.1.01	1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	4 Permu kiman	9.192.483	0 Permu kiman	-	4 Permu kiman	19.909.100	1 Permu kiman	-	25,00%	0,00%	1 Permu kiman	-	25%	0%		
	3.32.04.1.01.01	-	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigan yang Dibina	Kepala 360 Keluarg a	9.192.483	0 Kepala Keluarg a	0	315 Kepala Keluarg a	19.909.100	0 Kepala Keluarg a	0	0,00%	0,00%	0 Kepala Keluar ga	-	0%	0%	Disnaker	
8	3.32.02		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	100 %	-	0 %	-	80 %	7.567.500	25 %		7.150.000	31,25%	94,48%	25 %	7.150.000	25%	#DIV/0!	
	3.32.02.1.01	1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	4 Kawas an	-	0 Kawas an	-	4 Kawas an	7.567.500	1 Kawas an		7.150.000	25,00%	94,48%	1 Kawas an	7.150.000	25%	#DIV/0!	
	3.32.02.1.01.01	-	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	0 Dokum en	0	0 Dokum en	0	4 Dokum en	7.567.500	2 Dokum en		7.150.000	50,00%	94,48%	2 Kepala Keluar ga	7.150.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Disnaker
9	3.32.03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	REKAPITULASI WARGA TRANSMIGRASI YANG DITEMPATKAN	220 KK	-	0 %	-	150 KK	9.387.500	0 KK	-	0,00%	0,00%	0 KK	-	0%	#DIV/0!		
	3.32.03.1.01	1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi yang mendapatkan Program Penempatan	1 Lokasi	-	0 Lokasi	-	1 Lokasi	9.387.500	- Lokasi	-	0,00%	0,00%	0 Lokasi	-	0%	#DIV/0!		
	3.32.03.1.01.05	-	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	0 Kepala Keluarg a	0	0 Kepala Keluarg a	0	1124 Kepala Keluarg a	9.387.500	0 Kepala Keluarg a	0	0,00%	0,00%	0 Kepala Keluar ga	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Disnaker	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						29.662.636.240		30.311.262.085		32.265.607.963		9.424.676.140	19,30%	29,21%		39.735.938.225	85%	134%		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 9)									3.585.067.551		1.047.186.238	19,30%	29,21%		39.735.938.225	85%	134%			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 9)												sangat rendah	sangat rendah							

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : KINERJA BELUM JALAN SESUAI TAHAPAN ANGGARAN

FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : ADANYA EPISIENSI ANGGARAN SERTA TERDAPAT KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : AKAN SEGERA MELAKSANAKAN ANGGARAN SESUAI TAHAPAN DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN KAS

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Adapun analisis capaian kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian PD yang merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Program Prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun perencanaan tenaga kerja	7 Dokumen	8 Dokumen	10 Dokumen	13 Dokumen	7 Dokumen	3 Dokumen	10 Dokumen	13 Dokumen	
		-	Jumlah Perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	20 perusahaan	30 perusahaan	40 perusahaan	50 perusahaan	20 perusahaan	20 perusahaan	40 perusahaan	50 perusahaan	
2	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	-	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2025	656 orang	666 orang	678 orang	700 orang	582 orang	48 orang	678 orang	700 orang	
3	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	-	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	10 LPK	
4	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
5	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	Jumlah pencari kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	625 Orang	650 Orang	675 Orang	700 Orang	625 Orang	650 Orang	675 Orang	700 Orang	
6	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	-	Jumlah CPMI/PMI yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan CPMI/PMI	-	-	2500 Orang	2600 Orang	-	Orang	2500 Orang	2600 Orang	
7	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	130 perkara	130 perkara	130 perkara	130 perkara	37 perkara	perkara	130 perkara	130 perkara	
		-	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	14050 orang	14100 orang	14150 orang	14200 orang	14050 orang	orang	14150 orang	14200 orang	
		-	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	590 Perusahaan	615 Perusahaan	645 Perusahaan	675 Perusahaan	590 Perusahaan	Perusahaan	645 Perusahaan	675 Perusahaan	
8	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	Jumlah Penetapan UMP	1 Keputusan Gubernur	1 Keputusan Gubernur	1 Keputusan Gubernur	1 Keputusan Gubernur	1 Keputusan Gubernur	1 Keputusan Gubernur	1 Keputusan Gubernur	1 Keputusan Gubernur	
		-	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	601.381 orang	602.445 orang	603.534 orang	605.325 orang	608.135 orang	598.272 orang	603.534 orang	605.325 orang	
9	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	697 Perusahaan	715 Perusahaan	765 Perusahaan	798 Perusahaan	697 Perusahaan	Perusahaan	765 Perusahaan	798 Perusahaan	
		-	Jumlah Perusahaan Yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar di WLKP Online	103 Perusahaan	156 Perusahaan	189 Perusahaan	195 Perusahaan	103 Perusahaan	Perusahaan	189 Perusahaan	195 Perusahaan	
		-	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Biprit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
10	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	3300 Perusahaan	3450 perusahaan	3600 perusahaan	3750 perusahaan	1549 Perusahaan	3316 Perusahaan	3600 perusahaan	3750 perusahaan	
		-	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	100% 220	100% 250	100% 300	100% 350	100% 220	100% 247	100% 300	100% 350	
		-	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan K3	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	
11	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
		-	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	-	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
12	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan	-	Jumlah Kepala Keluarga Transmigasi yang Dibina	225 KK	270 KK	315 KK	360 KK	120 KK	0 KK	315 KK	360 KK	
13	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Pemukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang)	534 sertifikat	834 sertifikat	890 sertifikat	890 sertifikat	0 sertifikat	0 sertifikat	890 sertifikat	890 sertifikat	
		-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8 Kabupaten	8 Kabupaten	8 Kabupaten	8 Kabupaten	8 Kabupaten	8 Kabupaten	8 Kabupaten	8 Kabupaten	
		-	Jumlah Calon Transmigran/ Transmigran yang mendapatkan Pelatihan	500 KK	750 KK	1000 KK	1000 KK	120 KK	0 KK	1000 KK	1000 KK	
		-	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan	-	-	1124 KK	1250 KK	-	KK	1124 KK	1250 KK	

Target Indikator Outcome Prioritas Daerah (RAKORTEKRENBANG)

No.	Indikator	Target Nasional 2025	Satuan Target	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu Anggaran 2025	Catatan (untuk Bangda dan K/L)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
1	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	75	%	38	38	43	45	60	171.276.100	Masih memerlukan dukungan anggaran dari APBN serta tambahan paket pelatihan berbasis kompetensi
2	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	70	%	75	75	81,59	75	75	-	perlu adanya dukungan anggaran dari APBN dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja di daerah.
3	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	2	Laporan	1	1	1	1	2	-	perlu adanya dukungan anggaran pelatihan dari APBN dan Kegiatan Job Fair.
4	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	250.000	Orang	343	200	503	225	2.500	-	perlu adanya dukungan anggaran dari APBN untuk Kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia di daerah
5	Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	2.315.250	Orang	14.186	800	17.569	900	22.000	-	Kurangnya kompetensi calon Tenaga Kerja, sehingga perlu adanya tambahan paket pelatihan kompetensi dan adanya dukungan anggaran pelatihan dan APBN serta kegiatan Job Fair.
6	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	55.000	Orang	7.306	700	7.098	750	800	-	perlu adanya dukungan anggaran APBN dan paket pelatihan tenaga kerja
7	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	75	Persentase	26	38	43	45	60	65.277.500	Masih memerlukan dukungan anggaran APBN dan paket pelatihan berbasis kompetensi
8	Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Online	570.000	Perusahaan	9.337	9.447	12.367	12.338	12.448	69.944.100	untuk pendataan memerlukan anggaran dari APBN dimana sampai saat ini masih sangat kurang.
9	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	2.100.000	Orang	314.000	315.000	351.867	317.000	318.000	308.911.100	untuk pendataan memerlukan anggaran dimana sampai saat ini masih sangat kurang
10	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	6.648.453	Orang	691.740	601.381	646.625	602.445	603.534	14.400.000.000	Merupakan anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
11	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD	60	%	100	100	100	100	60	175.862.912	indikator mohon diperjelas, anggaran yang ditagging adalah anggaran kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
1	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	57,50	Index	-	-	-	-	-	64.976.600	Provinsi Sulawesi Utara tidak masuk dalam perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional
2	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	46,10	Index	-	-	-	-	-	64.976.600	Provinsi Sulawesi Utara tidak masuk dalam perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas nasional. Saat ini sementara berproses usulan penetapan 1 kawasan transmigrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak mendapatkan Alokasi Anggaran dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, dimohonkan agar mendapat alokasi anggaran dari APBN untuk tahun 2024 dan tahun 2025.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Indikator	Target Tahun					Capaian		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH									
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,05	71,10	71,15	71,20	71,25	66,23% (93,22%)	72,62 (102,13%)	69,11 (97,13%)
2	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	20%	40%	60%	80%	100%	38,11%	38,11%	38,11%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Capaian		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	TENAGA KERJA								
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	33%	46%	53%	66%	80%	40%	53%	53,22%
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	65%	70%	75%	80%	85%	78,13%	59,55%	86,80%
	Tingkat produktifitas tenaga kerja	76,75	77,00	77,25	77,50	77,75	83,4	81,59	82,38
	Persentase perusahaan yang merupakan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	40%	50%	60%	70%	80%	40%	86,10%	47,88%
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	60%	61%	62%	63%	64%	65%	50,60%	58,33%
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%
	URUSAN PILIHAN								
2	TRANSMINGRASI								
	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	40%
	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	60%	70%	80%	90%	100%	69%	75%	70%
	Rekapitulasi Warga Transmigrasi yang ditempatkan	0 KK	50 KK	100 KK	150 KK	200 KK	0%	0%	0 KK

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

1. Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD

Pelayanan penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara belum optimal didukung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota, antara lain mengenai program yang ada di Kabupaten/Kota belum bersinergi dengan Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Disamping itu juga masih terbatasnya alokasi anggaran yang tertata dalam DPA pada Kabupaten/Kota.

Selanjutnya terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara masih sangat mengharapkan tambahan alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sebagaimana yang tertata dalam alokasi APBD dan APBN pada setiap tahun guna mendukung Prioritas Pembangunan Daerah yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD :

- (1) Jumlah Instruktur yang semakin berkurang serta tidak diimbangi dengan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar bagi yang berminat untuk menjadi Instruktur.
- (2) Belum semua Kabupaten membentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
- (3) Terbatasnya tenaga Pengawas Ketenagakerjaan dan Pegawai Mediator, dibanding jumlah perusahaan yang ada di Sulawesi Utara.
- (4) Peralatan Pelatihan yang ada di UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja yang sudah tidak memadai untuk menunjang kegiatan di *Workshop* karena harus disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan serta kemajuan teknologi saat ini.
- (5) Belum memadainya sarana serta prasarana asrama untuk menampung siswa dari luar daerah karena target peserta pelatihan adalah seluruh Provinsi Sulawesi Utara

3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah

- (1) Pelatihan Tenaga Kerja :
 - Pelatihan Berbasis Kompetensi, dengan indikator kinerja besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi semakin meningkat;

- Pelatihan Kewirausahaan, dengan indikator kinerja besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan semakin meningkat;
- (2) Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja :
 - Penempatan Tenaga Kerja melalui AKL, AKAD dan AKA dengan indikator kinerja besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan semakin meningkat;
- (3) Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja :
 - Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial dengan indikator kinerja besaran kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) semakin meningkat;
 - Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Kepesertaan Jaminan Sosial serta Penegakan Hukum Terkait Kepesertaan Jamsostek dengan indikator kinerja besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif semakin meningkat.
- (4) Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan :
 - Pemeriksaan Perusahaan dengan indikator kinerja besaran Pemeriksaan Perusahaan semakin meningkat
 - Pengujian Peralatan di Perusahaan dengan indikator kinerja besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan semakin meningkat.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

- (1) TANTANGAN
 - Terbatasnya Sumber Daya Aparatur.
 - Terbatasnya Sarana dan Prasarana.
 - Masih minimnya alokasi anggaran ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang pembiayaan melalui APBD.
 - Tingginya Migrasi tenaga kerja dari daerah lain ke Provinsi Sulawesi Utara.
 - Masih rendahnya tingkat Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - Pencari kerja masih memilih-milih lapangan pekerjaan pada sektor formal.
 - Porsi penduduk berusia lanjut yang bertambah akan mengurangi jumlah tenaga kerja produktif.
 - Angka pengangguran masih relatif tinggi.
 - Variasi lapangan kerja yang tersedia masih terbatas.
 - Pengangguran sukarela masih sering terjadi.
 - Jiwa dan semangat kewirausahaan masih kurang.

- Belum semua perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh lebih dari 50 orang membentuk LKS Bipartit, sementara LKS Bipartit yang ada belum berfungsi dengan baik.
- Belum semua perusahaan mewajibkan pekerjanya mengikuti Program Jamsostek.
- Perusahaan yang tidak memperhatikan hak-hak buruh masih ada.
- Adanya Pemutusan Hubungan Kerja.
- Perselisihan Hubungan Industrial masih relatif tinggi.
- Data ketenagakerjaan yang disampaikan dari Dinas Kabupaten/Kota kurang akurat dan bahkan ada yang tidak menyampaikan.
- Lahan lokasi pemukiman transmigrasi semakin terbatas.

(2) PELUANG

- Adanya pegawai yang diikutsertakan dalam pelatihan teknis fungsional.
- Adanya investasi yang sangat berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi.
- Adanya Balai Latihan Kerja yang menjadi tempat pelatihan bagi pencari kerja yang berbasis kompetensi dan masyarakat serta tersertifikasi dan diterima oleh pasar kerja.
- Kebijakan pasar kerja yang lentur.
- Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu penyelenggara MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).
- Kota Bitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- UMP Provinsi Sulawesi Utara cukup relatif tinggi.
- Lowongan pekerjaan sektor informal masih cukup besar.
- Adanya pemetaan kesempatan kerja berdasarkan potensi dan keunggulan daerah.
- Adanya dialog yang efektif antara pengusaha dan pekerja, sehingga adanya iklim kerja yang kondusif dan hubungan kerja yang harmonis.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti

(1) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Percepatan akreditasi Lembaga Pelatihan milik Pemerintah maupun Swasta;

- b) Percepatan Penerapan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan mendorong semua lembaga pelatihan untuk menerapkan pelatihan berbasis kompetensi mengacu pada kualifikasi dan okupasi;
- c) Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja melalui sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta penerapannya yang didukung peningkatan jumlah dan kapasitas asesor;
- d) Pengembangan program pendidikan dan pelatihan vokasi menggunakan kurikulum /modul pelatihan mengacu kepada standar kompetensi yang dikembangkan industri;
- e) Pelaksanaan uji kompetensi;
- f) Meningkatkan jumlah dan kapasitas asesor kompetensi dan akreditasi.
- g) Reformasi Kelembagaan dan Revitalisasi Saran dan Prasarana Balai Latihan Kerja Bitung;
- h) Penyelenggaraan pelatihan melalui Mobile Training Unit (MTU) agar dapat menjangkau daerah-daerah terpencil di perdesaan.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, melalui kegiatan :

- a) Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
- b) Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri;
- c) Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- d) Pelatihan Peningkatan Produktivitas bagi Tenaga Kerja di Perusahaan;
- e) Penilaian Kinerja Perusahaan dalam rangka penerimaan penghargaan Sidakarya/Paramakarya;
- f) Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan.

Indikator Kinerja dari Program ini adalah meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja yang diukur melalui :

- Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi
- Jumlah peserta pemagangan dalam Negeri
- Jumlah LPK yang diakreditasi
- Jumlah tenaga kerja diperusahaan yang meningkat produktivitasnya;
- Jumlah perusahaan yang dinilai kinerjanya dalam rangka penerimaan penghargaan Sidakarya/Paramakarya;
- Jumlah instruktur dan tenaga kepelatihan yang ditingkatkan kompetensinya.

(2) Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Pemberdayaan masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja dan penerapan model wirausaha serta pendampingan untuk pemberdayaan usaha mandiri;
- b) Mewujudkan pengendalian penggunaan TKA yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, melalui sistem dan mekanisme kriteria yang ditetapkan dalam kerangka Pasar Bebas AEC;
- c) Peningkatan kualitas penyelenggaraan di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja, melalui perluasan informasi dan transparansi kesempatan kerja dan juga akses kepada balai latihan kerja yang didukung dengan sistem rekrutmen dan penempatan yang terpadu dalam kerangka Pasar Bebas AEC;
- d) Peningkatan kesempatan bekerja bagi tenaga kerja dalam negeri melalui sektor formal dan informal dengan mengembangkan informasi pasar kerja dalam dan luar negeri secara terpadu yang dapat memberikan informasi efektif, efisien, terjaga keamanannya, akurat, dan andal dalam kerangka Pasar Bebas AEC;
- e) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan penempatan.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan Program Penempatan, melalui kegiatan:

- a) Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja (Pameran Bursa Kerja);
- b) Peningkatan Pembinaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Calon TKI/TKI Prov. Sulut;
- c) Pemberdayaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Sarjana melalui Penugasan Pendampingan Masyarakat;
- d) Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja;
- e) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
- f) Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja

Indikator Kinerja dari Program ini adalah meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja yang diukur melalui :

- Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

- Jumlah Peserta Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Calon TKI/TKI
- Jumlah tenaga kerja sarana yang melakukan pendampingan masyarakat
- Jumlah pendamping wirausaha baru (petugas lapangan padat karya, petugas lapangan TTG, pemandu wirausaha baru)
- Tersedianya data pencaker dan lowongan kerja di Kab/Kota
- Jumlah perusahaan yang menerapkan analisis jabatan.

(3) Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaa.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Peningkatan pelatihan bagi pelaku hubungan industrial mengenai teknik teknik negosiasi;
- b) Penyebarluasan hubungan industrial dan penguatan kelembagaan hubungan industrial;
- c) Pemberdayaan pengurus dan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Organisasi Perusahaan;
- d) Peningkatan pemahaman kepada pengusaha, pekerja/SP/SB mengenai tata cara pembentukan LKS Bipartit;
- e) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial
- f) Peningkatan pemahaman pelaku hubungan industrial mengenai pengupahan
- g) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang pengupahan , jaminan sosial tenaga kerja , pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi
- h) Peningkatan pemahaman kepada para pelaku hubungan industrial mengenai program jaminan sosial
- i) Peningkatan pelatihan kepada pelaku hubungan industrial mengenai pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- j) Mewujudkan tercapainya Perjanjian Bersama (PB) dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Mediator Hubungan Industrial
- k) Peningkatan pembuatan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, melalui kegiatan :

- a) Pelatihan Teknik Negosiasi Hubungan Industrial bagi unsur pengusaha dan pekerja;
- b) Peningkatan Kapasitas Pengurus SP/SB;
- c) Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP);
- d) Sosialisasi Pengupahan;
- e) Pemberdayaan Dewan Pengupahan;
- f) Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah;
- g) Sosialisasi Jaminan sosial;
- h) Penyelesaian Perselisihan di Luar Pengadilan HI;
- i) Bimtek Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan/PP;
- j) Bimtek Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama/PKB.

Indikator Kinerja dari Program ini adalah meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui persyaratan kerja, kesejahteraan, pengupahan dan penyelesaian hubungan industrial, yang diukur melalui :

- Jumlah pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pelatihan teknik negosiasi
- Jumlah pengurus dan anggota SP/SB yang diberdayakan
- Penetapan UMP melalui Peraturan Gubernur
- Jumlah pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai pengupahan
- Jumlah anggota dewan pengupahan yang diberdayakan
- Jumlah perusahaan yang mendapatkan pelatihan penyusunan struktur dan skala upah
- Jumlah pekerja/masyarakat yang menjadi peserta BPJS
- Jumlah Perjanjian Bersama (PB) yang dihasilkan oleh Mediator HI dalam Penyelesaian Perselisihan HI
- Jumlah pengusaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan/PP
- Jumlah pengusaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama/PKB.

(4) Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Meningkatkan kuantitas Pengawas Ketenagakerjaan melalui pendidikan dan pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan Umum, Spesialis dan PPNS;

- b) Meningkatkan kualitas Pengawas Ketenagakerjaan melalui bimbingan teknis pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan;
- c) Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jamsostek melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, dan pengupahan, norma penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam dan luar negeri, norma penggunaan tenaga kerja asing, norma pelatihan kerja, norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat, norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- d) Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan sebagai perlindungan fungsi reproduksi dan sosial
- e) Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja anak sebagai perlindungan hak anak sebagai generasi penerus bangsa untuk mengembangkan minat dan bakatnya serta hak untuk wajib belajar
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kelembagaan, keahlian dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, norma konstruksi bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran, norma kesehatan kerja, norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya dan penanganan HIV-AIDS di perusahaan serta pengkajian dan penetapan standar K3, pengujian dan pemeriksaan K3, jejaring kerjasama dan peran serta masyarakat bidang K3, promosi dan sosialisasi K3.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan Program Pengawasan Ketenagakerjaan, melalui kegiatan :

- a) Pemeriksaan Penerapan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan\anak ;
- b) Bimtek SMK3;
- c) Sosialisasi Kesehatan Kerja;
- d) Sosialisasi HIV/AIDS di tempat kerja;
- e) Pengawasan Norma Kerja di Perusahaan;
- f) Pengawasan Objek Pengujian K3 di perusahaan;
- g) Pengujian Kualitas Lingkungan Kerja di Perusahaan;
- h) Peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja;
- i) Peningkatan SDM bidang K3 dan hygiene perusahaan.

Indikator Kinerja dari Program Pengawasan Ketenagakerjaan, yang diukur melalui :

- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan tenaga kerja perempuan/anak
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kelembagaan, keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, pengupahan dan jamsostek
- Jumlah pengujian dan pemeriksaan K3 di perusahaan
- Jumlah perusahaan yang diuji kualitas lingkungan kerjanya
- Jumlah pekerja yang diperiksa derajat kesehatan kerjanya
- Jumlah pekerja yang dilatih K3 dan higiene perusahaan.

(5) Peningkatan areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang;
- b) Peningkatan kemandirian masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi;
- c) Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan melalui kegiatan :

- a) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi;
- b) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan;
- c) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Indikator Kinerja dari Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, yang diukur melalui :

- Jumlah warga transmigrasi yang dilatih.
- Jumlah peserta sosialisasi bagi masyarakat setempat untuk mengikuti program transmigrasi.
- Jumlah Kelembagaan Masyarakat PKK, KT, Karang Taruna yang Mandiri di Kawasan Transmigrasi.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terkait prioritas program dan kegiatan serta indikator kinerja berdasarkan Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017 untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan RKPD.

Adapun review terhadap rancangan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2025

Nama PD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

No	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.049.880.430	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				17.550.207.028
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.468.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.154.014.638
01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Manado, Bitung	150 Dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Manado, Bitung	150 Dokumen	402.438.895
02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Manado, Bitung	113 pegawai	16.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Manado, Bitung	113 pegawai	14.700.105.130
03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Dokumen	350.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Dokumen	18.756.766
04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	38.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	10.608.260
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Dokumen	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Dokumen	22.105.587
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				69.880.520	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				9.405.300
01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	69.880.520	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	9.405.300
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				152.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.911.900
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai ketentuan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113 pegawai	90.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai ketentuan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113 pegawai	20.400.000
02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Perangkat Daerah	113 pegawai	27.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Perangkat Daerah	113 pegawai	0
03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Perangkat Daerah	113 Pegawai	35.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113 Pegawai	511.900
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				285.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				283.260.997
01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Paket	120.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Paket	93.783.597
03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	165.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	189.477.400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				285.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.359.990.350
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	238.400.000
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	235.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	1.121.590.350
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				543.390.122	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				354.162.753
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Manado	1 unit	225.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Manado	1 unit	68.317.780
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Manado dan Bitung	5 unit	43.390.122	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Manado dan Bitung	5 unit	197.590.973
03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Unit	125.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Unit	47.000.000
04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 unit	41.254.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				176.609.788	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				354.502.190
01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Manado dan Bitung	50 Unit	176.609.788	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Manado dan Bitung	50 Unit	354.502.190
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.958.900
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kota Manado	3 dokumen	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kota Manado	3 dokumen	6.398.900
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Manado	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Manado	1 Dokumen	5.160.000

03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Manado	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Manado	1 Dokumen	2.400.000	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					41.966.572	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					79.971.900
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					41.966.572	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					79.971.900
01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun perencanaan tenaga kerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	41.966.572	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun perencanaan tenaga kerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	79.971.900	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					409.806.142,07	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					165.004.290,00
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					360.000.000	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					136.097.290
01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	678 orang	360.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	678 orang	136.097.290	
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja					49.806.142	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja					28.907.000
	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 LPK	49.806.142	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 LPK	28.907.000	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					173.917.047	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					279.709.000
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					75.000.000	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					75.000.000
01	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	75.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	75.000.000	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					98.917.047	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					169.722.000
01	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	675 Orang	98.917.047	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	675 Orang	169.722.000	
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi					0	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi					34.987.000
01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan CPMI/PMI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2500 Orang	0	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan CPMI/PMI	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2500 Orang	34.987.000	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					11.350.000.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					15.859.430.320
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)					11.350.000.000	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)					15.859.430.320
01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Keputusan Gubernur	350.000.000	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Keputusan Gubernur	103.058.500	
02	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	603.534 orang	11.000.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	603.534 orang	15.756.371.820	
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					458.999.112	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					150.793.145
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					458.999.112	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					150.793.145
01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3600 perusahaan	210.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3600 perusahaan	23.801.840	
03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan K3	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Perusahaan	248.999.112	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan K3	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Perusahaan	126.991.305	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					19.462.210	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					36.864.100
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					0	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					7.185.500
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi					0	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi					7.185.500
01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	0	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	7.185.500	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					10.000.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					9.769.500
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					10.000.000	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					9.769.500
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkroniasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkroniasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	0	
02	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1124 KK	0	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1124 KK	9.769.500	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					9.462.210	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					19.909.100
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan					9.462.210	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan					19.909.100
01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigasi yang Dibina	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315 KK	9.462.210	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigasi yang Dibina	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315 KK	19.909.100	
					30.504.031.513						34.121.979.783

2.5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Masyarakat sangat menaruh perhatian terhadap berbagai program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam memenuhi kebutuhannya baik dalam penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja, hubungan kerja maupun perlindungan tenaga kerja.

Program pelatihan kerja sebagai sarana untuk menjembatani dunia pendidikan formal dengan dunia kerja yang menjadi tumpuan masyarakat. Pasar kerja dimana pencari kerja lebih banyak dari pada kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan pemberi kerja mempunyai keleluasaan mendapatkan calon tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Oleh karena itu pencari kerja akan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dan diharapkan pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk dapat meningkatkan kualitas pencari kerja seperti yang diinginkan pemberi kerja.

Fasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelayanan penempatan tenaga kerja bagi masyarakat masih sangat terbatas. Di satu sisi, sebagian masyarakat menghadapi kendala dalam mengakses informasi pasar kerja. Akibat ketidaktersediaan informasi pasar kerja, maka sebagian dari mereka masuk ke pasar kerja di suatu daerah tanpa informasi dan pengetahuan sehingga akhirnya menjadi beban bagi daerah. Pembangunan pusat-pusat informasi pasar kerja yang mudah dijangkau sangat dibutuhkan dan diharapkan masyarakat. Pengembangan informasi pasar kerja melalui internet sangat dibutuhkan dan membantu, disarankan peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara perlu adanya informasi pasar kerja secara online yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga dapat memfasilitasi penyebaran informasi pasar kerja serta penyelenggaraan bursa kerja di daerah Kabupaten/Kota.

Berbagai program penempatan baik penempatan dalam negeri maupun luar negeri hendaknya tersedia dan tersebar di berbagai daerah. Tingginya upah yang ditawarkan di luar negeri dan belum terpenuhinya salah satu hak dasar warga negara yang paling penting yaitu: pekerjaan seperti diamanatkan di dalam Pasal 27 D ayat (2) UUD 1945 dan perubahannya, menjadi salah satu penyebab terjadinya migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Kondisi sekarang ini banyak pencari kerja yang menempuh mekanisme non-prosedural, sehingga harus mengeluarkan banyak biaya dalam upaya untuk mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri. Di sisi lain, masih sering dijumpai kasus-kasus hukum yang menimpa TKI di luar negeri. Melalui reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah berusaha menghilangkan segala hambatan tersebut.

Keluhan masyarakat pekerja yang umum didengar adalah rasa ketidakadilan dan ketidak-pastian dalam hubungan kerja. Berbagai praktek hubungan kerja dirasakan sangat merugikan pekerja, seperti masalah hubungan kerja dan pengupahan. Pola rekrutmen kontrak dan dipekerjakan dalam status *outsourcing* menjadi pola yang masih banyak diterapkan dalam dunia kerja saat ini.

Atas dasar berbagai persoalan tersebut masyarakat pekerja mengharapkan peran bersama Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja dapat mengeluarkan kebijakan dalam menghadapi situasi demikian yang dapat memberikan ketenangan bagi pekerja dalam bekerja dan meningkatkan produktivitas.

Dalam berbagai forum telah banyak tuntutan untuk mereformasi berbagai regulasi, seperti UU 13/2003 dan UU 39/2004. Masyarakat menganggap undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan oleh karenanya perlu diamandemen. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) masyarakat memandang permasalahan mengenai pengupahan, PHK dan kompensasinya, dan masalah *outsourcing* dipandang perlu disesuaikan dengan dinamika ekonomi.

Penegakan peraturan ketenagakerjaan atas norma kerja perlu ditingkatkan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan secara terus menerus sehingga tercapai perbandingan ideal antara jumlah pengawas dengan perusahaan. Masyarakat mengharapkan agar melalui pengawasan dan penegakan hukum di setiap perusahaan akan dapat meningkatkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha.

Iklim usaha yang kondusif diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan demikian investasi dapat berkembang dan diharapkan pula semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Hal ini juga akan membawa dampak terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Selanjutnya berdasarkan Hasil Pra Musrembang tahun 2025 dengan Kabupaten/Kota tidak adanya usulan untuk Tahun 2025, serta usulan Pokok Pikiran Dewan tidak ada yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Urusan Ketenagakerjaan					
1					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

a. Bidang Ketenagakerjaan

Kebijakan nasional bidang ketenagakerjaan diarahkan pada perluasan kesempatan kerja baik melalui kebijakan lintas sektor yang mendorong masing-masing sektor dalam menciptakan peluang kerja, maupun berbagai program pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara di dunia yang memiliki populasi sumberdaya manusia terbesar, tetapi dengan kualitas ketrampilan yang rendah. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah mengakibatkan rendahnya daya saing dalam dunia kerja, sehingga dapat mengakibatkan adanya pengangguran. Walaupun demikian, jumlah sumberdaya manusia yang besar ini harus diakui merupakan potensi besar yang harus dikelola dengan optimal yang merupakan salah satu alternatif solusi penting bagi proses percepatan pemulihan ekonomi. Demikian juga pasar tenaga kerja luar negeri merupakan tantangan dan potensi yang harus segera disambut dengan pengelolaan ketenagakerjaan yang profesional, efektif dan efisien. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri telah memberikan kontribusinya dalam mendukung dan memajukan Indonesia melalui remitansi yang menambah devisa negara. Krisis ekonomi dunia yang membuat berbagai negara harus mereformasi perekonomiannya ternyata tidak memberi pengaruh besar bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dengan mulai bangkitnya perekonomian dunia, tenaga kerja Indonesia dapat mengambil manfaat dari berbagai kesempatan yang ada.

Potensi lain yang dapat memajukan sektor ketenagakerjaan di daerah adalah dari kemajuan perekonomian daerah dengan pertumbuhan yang menggembirakan. Berbagai faktor telah dikembangkan yang memberikan dorongan untuk kemajuan yang lebih besar antara lain dimana pemerintah melakukan reformasi dan revitalisasi berbagai infrastruktur ketenagakerjaan seperti regulasi yang ramah terhadap investasi dan ketenangan berusaha. Demikian juga dengan infrastruktur peningkatan kualitas dan penempatan tenaga kerja. Sarana pelatihan telah dibangun dan direvitalisasi, dan saat ini telah berfungsi.

Keberadaan Balai Latihan Kerja Bitung, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kualitas, masih terbatas dan belum dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang berbasis kompetensi. Dalam upaya memenuhi tuntutan tersebut, telah dikembangkan Program *Three in One* yang meliputi pelatihan kerja, sertifikasi dan penempatan. Di Balai Latihan Kerja Bitung

dibentuk kios *Three in One* dalam upaya meningkatkan kesesuaian antara luaran pelatihan kerja dengan dunia usaha.

Disamping hal tersebut untuk menanggulangi masalah pengangguran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan berbagai kegiatan melalui Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) melalui kegiatan padat karya produktif, pemberdayaan teknologi tepat guna, wirausaha baru, penempatan tenaga kerja melalui subsidi program, pendampingan usaha mandiri, penempatan tenaga kerja melalui *job fair* dan bursa kerja yang informasinya dapat langsung diakses melalui bursa kerja *online*, serta penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Gejolak unjuk rasa/pemogokan dan penyelesaian masalah hubungan industrial yang berlarut-larut (PHK dan tuntutan upah) masih menjadi agenda penting. Berbagai tuntutan yang diajukan, utamanya terkait dengan aspek rekrutmen yang dikenal dengan sistem *outsourcing* dan sistem pengupahan. Di beberapa daerah Kabupaten/Kota sarana hubungan industrial belum terbentuk sepenuhnya dan terbatasnya tenaga pengawas ketenagakerjaan, bahkan ada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Kondisi ini mempunyai potensi menurunkan ketenangan berusaha dan bekerja, yang lebih jauh berdampak pada menurunnya kesejahteraan pekerja dan produktivitas pekerja maupun perusahaan.

b. Bidang Ketransmigrasian

Menghadapi besarnya kesenjangan antar wilayah yang menjadi salah satu sebab besarnya jumlah penduduk miskin terutama di perdesaan, maka pembangunan transmigrasi merupakan salah satu alternatif solusi yang dapat dikembangkan untuk mengintegrasikan pembangunan kawasan perdesaan sebagai *hinterland* dengan kawasan perkotaan, sebagai pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang tersedia. Dengan disahkannya UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, maka transmigrasi akan lebih jelas perannya dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan perdesaan dan pengembangan ekonomi lokal sebagai upaya peningkatan daya saing daerah. Hal tersebut disebabkan karena berubahnya pendekatan pembangunan transmigrasi dari pendekatan perpindahan penduduk menjadi pendekatan pengembangan kawasan, semakin besarnya peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan transmigrasi, serta diwajibkannya kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan kepada Badan Usaha untuk mengembangkan investasi di Kawasan Transmigrasi. Berdasarkan perubahan UU tersebut, maka peran transmigrasi dalam RPJM Nasional tahun 2017-2021 maupun dalam RPJMD Tahun 2016-2021 semakin jelas dan terukur, yaitu mendukung Prioritas Bidang

Wilayah dan Tata Ruang dalam pembangunan perdesaan dan pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

Pembangunan bidang ketransmigrasian selain menjadi alternatif dalam mengurangi kesenjangan wilayah, dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional/daerah dan kecukupan pangan, memperkuat pilar ketahanan nasional/daerah, mendukung kebijakan pengembangan energi alternatif, mendukung pemerataan investasi secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Untuk mendukung program tersebut di atas, terdapat sejumlah kawasan transmigrasi yang potensial untuk direvitalisasi dan kawasan baru yang potensial dikembangkan untuk mempercepat tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru.

Sejak diimplementasikan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota, kecamatan dan desa yang cukup signifikan. Sementara itu, pembangunan perdesaan terutama di daerah tertinggal, yang selama ini cenderung mengabaikan potensi sinergi dengan kawasan perkotaan dalam suatu konsep pengembangan wilayah dapat mengakibatkan hasil pembangunan perdesaan justru tersedot ke perkotaan baik dari sisi sumberdaya manusia, alam, bahkan modal. Kondisi kawasan perdesaan tersebut pada umumnya memiliki potensi sumberdaya alam cukup besar, namun belum didukung dengan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang memadai sehingga merupakan peluang cukup besar untuk pengembangan program-program ketransmigrasian.

Memperhatikan berbagai potensi dan peluang tersebut, maka pembangunan transmigrasi berbasis kawasan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, pada dasarnya merupakan peluang yang cukup besar bagi badan usaha untuk berinvestasi dan terintegrasi dengan pembangunan kawasan transmigrasi, yang perlu didukung sumberdaya masyarakat transmigrasi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

a. TUJUAN

Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah untuk mencapai tujuan pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara, sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang telah diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebelumnya.

Untuk mencapai tujuan pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara, maka berikut tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah dan Perusahaan;
2. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif, berdaya saing yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk menuju Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera;
3. Meningkatkan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja yang efektif;
4. Meningkatnya pengembangan dan peran kelembagaan Hubungan Industrial yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
5. Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment) dan profesional; dan
6. Menyiapkan areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang.

b. SASARAN

Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah dan Perusahaan;
2. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja;
4. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki suasana kerja agar lebih kondusif;
5. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan; dan
6. Tersedianya lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak berkembang dan layak lingkungan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

- 1. Jumlah Program sebanyak 9 (sembilan) program, jumlah Kegiatan sebanyak 19 (sembilan belas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan sebanyak 33 (tiga puluh tiga),** dengan rincian sebagai berikut :

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, dengan kegiatan dan sub kegiatan yakni :
 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; dan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 8. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; dan
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- b. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA, dengan kegiatan dan sub kegiatan yakni :
 - 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) :
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.
- c. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, dengan kegiatan dan sub kegiatan yakni :
 - 1. Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi :
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
 - 2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja :

- Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja.
- d. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, dengan kegiatan dan sub kegiatan yakni :
 1. Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.
 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Job Fair/Bursa Kerja.
 3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- e. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, dengan kegiatan dan sub kegiatan yakni :
 1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) :
 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); dan
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.
- f. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, dengan kegiatan dan sub kegiatan yakni :
 1. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan :
 - Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
 - Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan.
- g. PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI, dengan kegiatan dan sub kegiatan yakni :
 1. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi:
 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi.
- h. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, dengan kegiatan dan sub kegiatan yakni :
 1. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:
 - Penyuluhan Transmigrasi.
- i. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI, dengan kegiatan dan sub kegiatan yakni :
 1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan:
 - Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Adapun penyebaran program dan kegiatan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Tahun 2025 terlampir dalam **Tabel TC.33.**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pilihan dan urusan wajib non pelayanan dasar di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, dengan Prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Prioritas Nasional, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendukung dalam hal :

1. Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, serta Tema Pembangunan Rancangan RKPD Tahun 2025 yaitu "Sulawesi Utara sebagai Super Hub di Kawasan Timur Indonesia".
2. Program Prioritas Pembangunan yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 yaitu pada Program-program :
 - Program Ke-2 (dua) yaitu "Penguatan Kapasitas SDM Sulawesi Utara",
 - Program Ke-5 (lima) yaitu "Penanggulangan Kemiskinan" dan
 - Program Ke-7 (tujuh) yaitu "Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan" dari 8 (delapan) Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta sumber-sumber pendanaan lainnya)

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan Rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 serta dapat membawa pengaruh positif terhadap pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Utara.

Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan adanya ketersediaan alokasi anggaran APBD sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Upaya tersebut tentunya harus didukung oleh komitmen dari seluruh jajaran lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara maupun Kabupaten/Kota, serta *stakeholder* yang mempunyai perhatian terhadap persoalan-persoalan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANHIR RENJA) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara lebih khusus di Provinsi Sulawesi Utara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Kerja dan Pendanaan Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 dijabarkan pada tabel-tabel yang terdapat dalam lampiran Renja ini.

Manado, 5 Agustus 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



RAHEL R. ROTINSULU, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19760920 199511 2 001

TABEL TC.33

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2025

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		30.306.486.655,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							29.684.444.427,00	30.641.297.705,00	32.373.704.807,00	2.689.260.380,00							30.181.486.655,00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							29.684.444.427,00	30.586.321.105,00	32.373.704.807,00	2.689.260.380,00							30.181.486.655,00		
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				96 %	96 %	14.872.298.527,00	15.774.175.205,00	16.115.659.762,00	2.158.061.781,00							17.030.360.308,00		
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				100 %	100 %	13.958.900,00	13.958.900,00	13.958.900,00	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	-		40.759.818,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.398.900,00	6.398.900,00	6.398.900,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			14.398.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			20.360.918,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				96 %	96 %	13.477.388.881,00	14.579.265.559,00	15.079.265.559,00	1.601.876.678,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	-		15.493.010.070,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				113 Orang/ Bulan	113 Orang/ Bulan	12.854.801.491,00	14.200.105.130,00	14.700.105.130,00	1.845.303.639,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBERKATAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			14.854.801.491,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				65 Dokumen	65 Dokumen	611.739.190,00	368.312.229,00	368.312.229,00	-243.426.961,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			621.560.379,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			1.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.448.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			5.448.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

No	Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKRAJA CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKRAJA MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEKUDAH	RKPD 2025		APBD 2025					RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.000.200,00	4.000.200,00	4.000.200,00	0,00	Kota Marado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMLUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			10.000.200,00	DNAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian				100 %	100 %	73.511.900,00	73.511.900,00	511.900,00	-73.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	-		94.971.500,00	DNAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				68 Paket	68 Paket	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	-73.000.000,00	Kota Marado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMLUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			75.000.000,00	DNAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				113 Orang	113 Orang	511.900,00	511.900,00	511.900,00	0,00	Kota Marado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMLUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			19.971.500,00	DNAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kehadiran dalam acara yang diundang				98 %	98 %	411.690.600,00	411.690.600,00	253.837.247,00	-157.853.353,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	-		275.125.944,00	DNAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	78.481.800,00	78.481.800,00	73.367.947,00	-5.113.853,00	Kota Marado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMLUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			99.319.344,00	DNAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	333.208.800,00	333.208.800,00	180.469.300,00	-152.739.500,00	Kota Marado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMLUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			175.806.500,00	DNAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan				100 %	100 %	106.199.250,00	106.199.250,00	188.537.160,00	82.337.910,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	-		151.391.998,00	DNAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	106.199.250,00	106.199.250,00	188.537.160,00	82.337.910,00	Kota Marado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMLUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			151.391.998,00	DNAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Persentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut				98 %	98 %	545.154.516,00	345.154.516,00	335.154.516,00	-210.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	-		569.154.516,00	DNAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
															Nasiona	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD				-	20 Orang	0,00		0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangkang disabilitas.	8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran 8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran		80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengeltakaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah provinsi				1080 lowongan	1080 lowongan	57.257.000,00	57.257.000,00	169.722.000,00	112.465.000,00			melakukan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran 8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	-		100.277.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				675 Orang	675 Orang	57.257.000,00	57.257.000,00	169.722.000,00	112.465.000,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	melakukan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran 8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran			100.277.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04	Perlindungan PMI (Pria dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah CPM/PMI yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan CPM/PMI				2500 Orang	2500 Orang	34.987.000,00	34.987.000,00	34.987.000,00	0,00			memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran 8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPM/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				2500 Orang	2500 Orang	34.987.000,00	34.987.000,00	34.987.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran 8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PPHKBL, LKS bipartit, struktur skala upah dan terdaftar Peserta BPJS				70 %	70 %	14.503.058.500,00	14.503.058.500,00	15.859.430.320,00	-1.897.332.865,00							12.605.725.635,00	
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Kabupaten/Kota yang menetapkan UMK sesuai dengan peraturan perundangan				1 Kabupaten nKota	1 Kabupaten nKota	14.503.058.500,00	14.503.058.500,00	15.859.430.320,00	1.356.371.820,00			memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran 8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	-		12.605.725.635,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)																		
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	103.058.500,00	103.058.500,00	103.058.500,00	0,00	Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran 8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran			105.725.635,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				603.534 Orang	603.534 Orang	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00	15.756.371.820,00	1.356.371.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran 8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran			12.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN				95 %	95 %	69.209.000,00	69.209.000,00	38.933.825,00	55.061.300,00							124.260.300,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	69.209.000,00	69.209.000,00	38.933.825,00	-30.275.175,00			memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran 8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	-		124.260.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				75 Perusahaan	75 Perusahaan	69.209.000,00	69.209.000,00	38.933.825,00	-30.275.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran 8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran			124.260.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							54.976.600,00	54.976.600,00	36.864.100,00	-18.112.500,00							125.000.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							54.976.600,00	54.976.600,00	36.864.100,00	-18.112.500,00							125.000.000,00	
1.	3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	7.185.500,00	5.000.000,00							20.000.000,00	
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakembangkan dengan Daerah Lain				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	7.185.500,00	-7.814.500,00			membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran 8. Peninggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

[illegible]

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TAROET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA								1.109.883.107,00	1.109.883.107,00	1.034.897.973,00	-74.985.134,00							1.109.883.107,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.109.883.107,00	1.109.883.107,00	1.034.897.973,00	-74.985.134,00							1.109.883.107,00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							1.109.883.107,00	1.109.883.107,00	1.034.897.973,00	-74.985.134,00							1.109.883.107,00		
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				96 %	96 %	947.940.817,00	889.332.817,00	869.893.683,00	-65.030.710,00							882.910.107,00		
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				96 %	96 %	34.612.000,00	34.792.000,00	34.608.866,00	-3.134,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	-		36.206.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				45 Dokumen	45 Dokumen	20.749.700,00	20.929.700,00	20.857.206,00	107.506,00	Kota Bitung, Madidir, Madidir Ure	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			22.239.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	9.015.300,00	9.015.300,00	9.015.300,00	0,00	Kota Bitung, Madidir, Madidir Ure	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			9.474.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.041.100,00	2.041.100,00	1.967.960,00	-73.140,00	Kota Bitung, Madidir, Madidir Ure	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			1.692.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.805.900,00	2.805.900,00	2.768.400,00	-37.500,00	Kota Bitung, Madidir, Madidir Ure	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			2.799.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset yang tercatat				100 %	100 %	3.353.750,00	3.353.750,00	2.597.300,00	-756.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	-		3.330.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	3.353.750,00	3.353.750,00	2.597.300,00	-756.450,00	Kota Bitung, Madidir, Madidir Ure	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			3.330.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	-		17.850.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				17 Paket	17 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD			17.850.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kehadiran dalam acara yang diundang				98 %	98 %	23.107.700,00	23.107.700,00	9.008.100,00	-14.099.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	-		12.007.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	23.107.700,00	23.107.700,00	9.008.100,00	-14.099.600,00	Kota Bitung, Madidir, Madidir Ure	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			12.007.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan				100 %	100 %	188.045.030,00	129.550.180,00	135.965.030,00	-52.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	-		83.926.546,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	188.045.030,00	129.550.180,00	135.965.030,00	-52.080.000,00	Kota Bitung, Madidir, Madidir Ure	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			83.926.546,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata- rata Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut				98 %	98 %	642.256.100,00	642.256.064,00	626.216.114,00	-16.039.986,00			-	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	-		643.013.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.000.000,00	84.000.000,00	72.000.000,00	-12.000.000,00	Kota Bitung, Madidir, Madidir Ure	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			84.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	558.256.100,00	558.256.064,00	554.216.114,00	-4.039.986,00	Kota Bitung, Madidir, Madidir Ure	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			559.013.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik				99 %	99 %	56.566.237,00	56.273.123,00	61.498.273,00	4.932.036,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN	-		86.575.561,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	41.216.437,00	40.923.323,00	41.370.973,00	154.536,00	Kota Bitung, Madidir, Madidir Ure	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			37.871.461,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.349.800,00	15.349.800,00	20.127.300,00	4.777.500,00	Kota Bitung, Madidir, Madidir Ure	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN 1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bebas KKN			48.704.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI				80 %	80 %	161.942.290,00	220.550.290,00	165.004.290,00	65.030.710,00							226.973.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Penyerapan Lulusan				70 %	70 %	108.139.290,00	166.747.290,00	136.097.290,00	27.958.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran 8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	Masyarakat		171.276.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				48 Orang	48 Orang	108.139.290,00	166.747.290,00	136.097.290,00	27.958.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran 8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran			171.276.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi				50 %	50 %	53.803.000,00	53.803.000,00	28.907.000,00	-24.896.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran 8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran	-		55.696.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				5 LPK	5 LPK	53.803.000,00	53.803.000,00	28.907.000,00	-24.896.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran 8. Penanggulangan Kemiskinan, Stunting, dan Pengangguran			55.696.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H								1.109.883.107,00	1.109.883.107,00	1.034.897.973,00	-74.985.134,00							1.109.883.107,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA							753.655.582,00	753.655.582,00	676.512.903,00	-77.142.679,00							753.655.582,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							753.655.582,00	753.655.582,00	676.512.903,00	-77.142.679,00							753.655.582,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							753.655.582,00	753.655.582,00	676.512.903,00	-77.142.679,00							753.655.582,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	584.004.782,00	568.681.262,00	564.653.583,00	0,00							584.004.782,00	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	42.045.582,00	44.167.892,00	40.140.213,00	-1.905.369,00			-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan Daerah, Penguatan Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	-		42.045.582,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	13.263.400,00	13.269.460,00	13.269.460,00	6.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD			13.263.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	8.717.782,00	8.783.320,00	7.341.466,00	-1.376.316,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD			8.717.782,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.059.600,00	4.192.300,00	4.192.300,00	132.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD			4.059.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	16.004.800,00	17.922.812,00	15.336.987,00	-667.813,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD			16.004.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	6.808.200,00	6.808.000,00	6.808.000,00	-200,00			-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	-		6.808.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.808.200,00	6.808.000,00	6.808.000,00	-200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD			6.808.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00			-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	-		20.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD			20.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	20.421.000,00	20.415.650,00	20.415.650,00	-5.350,00			-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	-		20.421.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.421.000,00	20.415.650,00	20.415.650,00	-5.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD			20.421.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00			-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	-		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	434.400.000,00	398.619.720,00	398.619.720,00	-35.780.280,00			-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	-		434.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	56.400.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD			56.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	378.000.000,00	342.219.720,00	342.219.720,00	-35.780.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD			378.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	44.930.000,00	48.270.000,00	48.270.000,00	3.340.000,00			-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD	-		44.930.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.930.000,00	37.270.000,00	37.270.000,00	3.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD			33.930.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD 7. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah, Investasi Daerah, Penguatan UMKM, Koperasi, dan BUMD			11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-				-	-	169.650.800,00	184.974.320,00	111.859.320,00	0,00							169.650.800,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-				-	-	169.650.800,00	184.974.320,00	111.859.320,00	-57.791.480,00			-	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba 2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba	-		169.650.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				2000 Perus ahaan	2000 Perus ahaan	44.944.100,00	45.146.840,00	23.801.840,00	-21.142.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba 2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba			44.944.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				200 Perusa haan	200 Perusa haan	124.706.700,00	139.827.480,00	88.057.480,00	-36.649.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba 2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Bebas Narkoba			124.706.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		J U M L A H							753.655.582,00	753.655.582,00	676.512.903,00	-77.142.679,00						753.655.582,00		